



Article Informations

Corresponding Email:

6211191055.sultanfajarmaulana@gmail.com

Received: 30/01/2025; Accepted:

11/02/2025; Published: 30/06/2025

UPAYA DIPLOMASI INDONESIA DALAM MENGHADAPI EMBARGO MINYAK KELAPA SAWIT OLEH UNI EROPA TAHUN 2017-2020

Sultan Fajar Maulana¹⁾, Iing Nurdin²⁾, I Wayan Aditya Harikesa³⁾

^{1,2,3)}Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstrak

Industri minyak kelapa sawit (CPO) merupakan salah satu komoditas ekspor terbesar Indonesia dan penyumbang devisa utama. Seiring dengan meningkatnya permintaan pasar global terhadap CPO Indonesia, muncul berbagai isu yang mengklaim bahwa minyak kelapa sawit Indonesia menyebabkan deforestasi, perubahan iklim, pemanasan global, serta dianggap tidak ramah lingkungan. Isu-isu ini memicu sejumlah negara importir, termasuk negara-negara di Eropa, untuk melakukan boikot terhadap CPO Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan teori liberalisme interdependensi, dengan mengedepankan konsep kebijakan luar negeri, diplomasi ekonomi, dan ekonomi politik internasional. Sebagai respons terhadap embargo minyak kelapa sawit yang diterapkan oleh Uni Eropa, termasuk Belanda, Indonesia melaksanakan diplomasi ekonomi dengan cara mengajak Belanda untuk meningkatkan kerja sama dalam meningkatkan keberlanjutan (sustainability) industri kelapa sawit melalui sertifikasi ISPO. Indonesia juga mendorong Belanda untuk bekerja sama dalam kesepakatan bersama yang diatur dalam bentuk MoU, serta memperluas hubungan bilateral di bidang ekonomi, perdagangan, investasi, dan pariwisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu langkah utama Indonesia untuk mengatasi embargo tersebut adalah dengan penandatanganan MoU dengan Belanda pada 26 September 2019. Selain itu, Indonesia juga mengimplementasikan program B30 sebagai upaya untuk mengatasi dampak embargo dan meningkatkan kepercayaan terhadap CPO Indonesia.

Kata Kunci: CPO, Embargo, Diplomasi, Indonesia, Uni Eropa

Abstract

The palm oil (CPO) industry is one of Indonesia's largest export commodities and a major foreign exchange earner. Along with the increasing global market demand for Indonesian CPO, various issues have emerged claiming that Indonesian palm oil

causes deforestation, climate change, global warming, and is considered environmentally unfriendly. These issues triggered a number of importing countries, including European countries, to boycott Indonesian CPO. This research uses a qualitative approach and the theory of interdependence liberalism, by prioritizing the concepts of foreign policy, economic diplomacy and international political economy. In response to the palm oil embargo implemented by the European Union, including the Netherlands, Indonesia implemented economic diplomacy by inviting the Netherlands to increase cooperation in improving the sustainability of the palm oil industry through ISPO certification. Indonesia also encourages the Netherlands to cooperate in mutual agreements regulated in the form of an MoU, as well as expanding bilateral relations in the fields of economy, trade, investment and tourism. The research results show that one of Indonesia's main steps to overcome the embargo was by signing an MoU with the Netherlands on September 26 2019. Apart from that, Indonesia also implemented the B30 program as an effort to overcome the impact of the embargo and increase trust in Indonesian CPO.

Keywords: CPO, Embargo, Diplomacy, Indonesia, European Union

PENDAHULUAN

Indonesia, dengan wilayah yang luas yang mencakup daratan dan lautan, memiliki potensi besar dari sumber daya alam (SDA). Dukungan serta dorongan dari sektor pertanian telah membantu Indonesia, sebagai negara agraris yang berkembang, mencapai kemajuan signifikan. Salah satu subsektor pertanian yang berperan besar dalam hal ini adalah subsektor perkebunan. Indonesia, sebagai negara dengan SDA melimpah, memiliki potensi besar untuk menjadi aktor utama dalam produksi komoditas perkebunan global. Salah satu contoh konkret adalah minyak kelapa sawit, di mana Indonesia diakui sebagai penghasil terbesar di dunia untuk komoditas ini, memainkan peran kunci dalam pasar internasional.

Industri minyak kelapa sawit ataupun *Crude Palm Oil* (CPO) menjadi satu diantara komoditas ekspor terbesar bagi Indonesia, memegang peranan krusial dalam peningkatan perekonomian negara. Penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia ialah *crude palm oil*.

Tabel 1. Jumlah Ekspor dan Devisa CPO

	2017	2018	2019	2020
Ekspor (Juta Ton)	29,07	29,67	30,22	27,63
Devisa (Miliar USD)	20,72	18,23	15,98	18,69

Sumber: Badan Pusat Statistik 2020

Dengan pesatnya perkembangan pada subsektor perkebunan kelapa sawit di Indonesia, dipicu oleh peningkatan permintaan global terhadap

minyak organik untuk berbagai keperluan, termasuk makanan dan biodiesel, Indonesia menjadi satu di antara pengeksport utama *crude palm oil*. Selain Indonesia, beberapa negara lain juga menjadi produsen atau pengeksport terbesar minyak kelapa sawit di dunia, seperti Malaysia, Thailand, Colombia serta Nigeria.

Seiring meningkatnya permintaan global, Indonesia sebagai produsen terbesar minyak kelapa sawit menghadapi hambatan dalam ekspor, terutama terkait isu deforestasi, perubahan iklim, dan pelanggaran Hak Asasi Manusia di sektor perkebunan. Isu-isu ini memicu Uni Eropa untuk memboikot CPO Indonesia, dengan alasan produk tersebut dianggap tidak ramah lingkungan dan tidak berkelanjutan. Melalui kebijakan di parlemen, Uni Eropa berupaya mengurangi penggunaan minyak kelapa sawit sebagai bahan bakar biodiesel di kawasan mereka, guna melindungi produksi minyak nabati lokal dan mengatasi dampak negatif yang mereka kaitkan dengan industri sawit Indonesia (Suhandak, 2019)

Pada bulan Desember 2018, Uni Eropa menerapkan kebijakan RED II, yang merupakan amandemen dari kebijakan RED I. Kebijakan ini mengatur target baru dan mengikat negara – negara di kawasan Uni Eropa mengenai energi terbarukan yakni sekurang kurangnya 32% untuk tahun 2030 (European Parliament, 2018)

Kebijakan – kebijakan yang dibuat tersebut merupakan cara dari Uni Eropa untuk menghambatan perdagangan yang dibuat oleh beragam negara di kawasan Uni Eropa untuk melindungi komoditas minyak nabati lain yang ada di dalam kawasan, sehingga tidak kalah bersaing dengan minyak kelapa sawit atau CPO dari Indonesia yang masuk ke pasar Uni Eropa. Dengan adanya kebijakan tersebut, yang menjadi penghambat kegiatan ekspor minyak kelapa sawit atau CPO Indonesia ke pasar Uni Eropa mengakibatkan volume ekspor ke beberapa negara di kawasan Uni Eropa mengalami penurunan.

Penelitian ini menggunakan teori liberalisme interdependensi, Interdependensi mencerminkan saling keterikatan di antara berbagai negara serta aktor-aktor lainnya. Keberadaan saling keterikatan ini muncul karena setiap negara mempunyai kekurangan dan kelebihan tertentu. Adanya

disparitas ini mendorong terbentuknya kerjasama bilateral dan multilateral antar aktor untuk saling melengkapi (Keohane & Nye, 1977) Selain itu penelitian ni juga menggunakan konsep *Multi-Track Diplomacy*, yang merupakan perluasan dari paradigma "*Track One dan Track Three*" dan sebagai kegiatan yang saling berhubungan, antara individu, institusi, dan komunitas yang bekerja bersama untuk tujuan bersama yaitu terciptanya dunia yang damai. Selain itu, *Multi-Track Diplomacy* memanfaatkan semua lapisan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan memfasilitasi komunikasi antara semua lapisan masyarakat. Dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan jalur-jalur *Track One* dan *Track Three*. *Track One Diplomacy* adalah diplomasi yang dilakukan oleh aktor negara yakni pemerintah (*government-to-government*) dan merupakan elemen penting dalam diplomasi, sedangkan *track three* adalah diplomasi bisnis yang melibatkan peran para pelaku bisnis melalui peluang kegiatan kerjasama internasional di bidang ekonomi guna menjalin relasi dengan negara-negara lain melalui komunikasi ataupun jaringan bisnis untuk membantu menciptakan perdamaian (Diamond and McDonald, 1996)

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah kualitatif karena bersifat deskriptif. Menurut John W. Creswell (2016) dalam bukunya "Research Design," metode penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan dan memahami makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terkait masalah sosial atau kemanusiaan. Metode ini melibatkan beberapa langkah penting, seperti pengumpulan data dari partisipan, analisis data dari tema khusus menuju tema umum, serta interpretasi dan penjelasan makna data yang diperoleh.

Metode kualitatif ini digunakan untuk memahami secara mendalam makna dari data atau fenomena yang diteliti. Penelitian ini melibatkan pengumpulan data yang kemudian dianalisis untuk menjelaskan dan menggambarkan isu yang diteliti, serta menyusun kesimpulan dan saran berdasarkan hasil analisis. Dengan menggunakan metode ini, peneliti berusaha menjawab pertanyaan tentang bagaimana upaya diplomasi Indonesia dalam menangani embargo minyak kelapa sawit oleh Uni Eropa tahun 2017-2022.

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Diplomasi Indonesia Mengenai Minyak Kelapa Sawit

Hubungan Indonesia dengan Uni Eropa dimulai sejak 1967 melalui ASEAN, dengan Indonesia sebagai produsen utama minyak kelapa sawit yang menikmati manfaat ekspor, terutama ke Uni Eropa. Namun, pada 4 April 2017, Parlemen Uni Eropa mengeluarkan Resolusi Sawit dalam laporan tentang minyak kelapa sawit dan deforestasi. Resolusi tersebut mencakup Renewable Energy Directive II (RED II) yang mengatur pengurangan penggunaan minyak kelapa sawit dalam biofuel, dengan tujuan menghapus penggunaannya pada 2030. Sebagai negara penghasil terbesar, Indonesia merespons kebijakan ini dengan diplomasi ekonomi, berfokus pada peningkatan pemahaman tentang minyak kelapa sawit dan mempromosikan produk kelapa sawit Indonesia di pasar global yang potensial (Sally, 2016)

Multitrack diplomasi dalam hubungan internasional adalah pendekatan yang melibatkan berbagai jalur atau tingkatan untuk mencapai tujuan diplomatik, baik dalam menyelesaikan konflik, memajukan kerja sama, atau mencapai tujuan bersama. Berbeda dengan diplomasi tradisional yang hanya melibatkan pemerintah (state actors), multitrack diplomasi mencakup aktor non-pemerintah seperti NGO, perusahaan swasta, akademisi, media, tokoh masyarakat, dan kelompok agama. Pendekatan ini terdiri dari sembilan jalur utama: diplomasi pemerintah, diplomasi profesional, diplomasi bisnis, diplomasi warga negara, diplomasi media, diplomasi advokasi, diplomasi agama, diplomasi berbasis riset, dan diplomasi pendanaan. Masing-masing jalur memiliki peran penting dalam proses diplomasi global (Erman, 2017)

Indonesia menggunakan pendekatan multitrack diplomasi dalam perdagangan kelapa sawit untuk mengatasi tantangan, khususnya terkait isu keberlanjutan dan akses pasar global, seperti di Uni Eropa yang menerapkan standar ketat terhadap produk sawit. Dalam hal ini, Track 1 atau diplomasi pemerintah dijalankan melalui peran langsung pemerintah Indonesia, seperti Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perdagangan, yang melakukan negosiasi formal dengan negara tujuan ekspor dan forum internasional

(Virgy, 2020) Melalui jalur ini, Indonesia berusaha mempengaruhi kebijakan perdagangan serta memperjuangkan pengakuan terhadap produk sawit yang memenuhi standar keberlanjutan internasional. Pemerintah juga aktif dalam forum diplomatik untuk menyuarakan posisi Indonesia terkait sertifikasi sawit dan mendorong penerapan standar keberlanjutan yang lebih adil bagi negara penghasil sawit.

Sebagai bagian dari Track 1 dalam multitrack diplomasi, pemerintah Indonesia mengajukan gugatan terhadap Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada tahun 2019. Gugatan ini menyoroti kebijakan Uni Eropa yang dianggap diskriminatif terhadap produk minyak sawit Indonesia, khususnya melalui penerapan Renewable Energy Directive II (RED II), yang mengklasifikasikan sawit sebagai komoditas berisiko tinggi terhadap deforestasi (Tarigan, 2020). Kebijakan tersebut berdampak besar terhadap ekspor sawit Indonesia, menghambat akses pasar, dan mengurangi permintaan produk sawit Indonesia di pasar Eropa. Dengan langkah formal ini, pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Perdagangan dan tim hukum terkait, memanfaatkan mekanisme penyelesaian sengketa WTO untuk memperjuangkan akses pasar bagi sawit Indonesia serta melindungi kepentingan ekonomi nasional di tingkat internasional.

Selain Track 1, Indonesia juga menerapkan Track 3 yang melibatkan masyarakat sipil dan NGO untuk mendukung sawit berkelanjutan. Organisasi seperti GAPKI fokus pada advokasi dan edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keberlanjutan dalam industri sawit, serta kontribusinya terhadap ekonomi nasional tanpa merusak lingkungan (Riady and Badarul, 2023).

NGO lingkungan berperan dalam mengkampanyekan praktik ramah lingkungan, baik di tingkat lokal maupun internasional, untuk menunjukkan bahwa sawit Indonesia memenuhi standar keberlanjutan global dan meredam kritik terkait dampak lingkungannya.

Upaya Diplomasi Indonesia dalam Menghadapi Hambatan Uni Eropa di Belanda Tahun 2017-2020

Indonesia menghadapi masalah perdagangan minyak kelapa sawit dengan Uni Eropa, terutama terkait dengan kebijakan hambatan dagang

yang merugikan, seperti penerapan tarif bea masuk tinggi terhadap biodiesel Indonesia. Pada akhir 2019, Uni Eropa menetapkan tarif bea masuk sebesar 8 hingga 18 persen untuk biodiesel Indonesia selama lima tahun ke depan, dengan alasan bahwa perusahaan biodiesel Indonesia menerima subsidi berlebihan dari pemerintah Eropa. Kebijakan ini dianggap sebagai upaya Uni Eropa untuk menghambat ekspor biodiesel Indonesia. Hal ini merugikan Indonesia sebagai penghasil minyak sawit terbesar, yang juga berperan besar dalam perekonomian negara dan meningkatkan kesejahteraan petani kecil. Di Indonesia, sekitar 41 persen dari total 11,26 juta hektar lahan kelapa sawit dikelola oleh 2,3 juta petani kecil (Rahayu, 2023) Industri minyak sawit memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kemandirian finansial petani kecil. Untuk mengatasi hambatan ini, Indonesia merespons dengan menetapkan standar keberlanjutan dalam produksi dan pengelolaan minyak kelapa sawit, sebagai bukti komitmen terhadap praktik pertanian yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Respon ini dijalin dengan beberapa negara Uni Eropa, termasuk Belanda.

Untuk menghadapi hambatan Uni Eropa terkait minyak kelapa sawit pada 2017-2020, Indonesia mengadopsi berbagai strategi, termasuk kolaborasi internasional untuk meningkatkan produksi berkelanjutan. Langkah-langkah konkret yang diambil mencakup peningkatan komunikasi bilateral, negosiasi perdagangan, promosi keberlanjutan industri, serta partisipasi dalam forum internasional. Indonesia fokus pada penguatan argumen terkait keberlanjutan produksi minyak kelapa sawit dan manfaat ekonomi serta sosial bagi masyarakat, seperti penciptaan lapangan kerja. Selain itu, Indonesia mendorong kerja sama dalam penelitian dan pengembangan teknologi ramah lingkungan untuk menunjukkan komitmennya terhadap praktik berkelanjutan. Upaya ini bertujuan memperbaiki citra minyak kelapa sawit Indonesia di pasar Uni Eropa dan membangun kepercayaan dengan negara-negara Uni Eropa.

Indonesia dan Belanda menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) pada 26 September 2019 ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, dan Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Belanda, Sigrid Kaag. untuk meningkatkan kapasitas petani

kecil dalam praktik pertanian berkelanjutan dan membantu mereka memperoleh sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) (BPDP, 2019) Kemitraan ini juga mendukung peningkatan produktivitas kelapa sawit, mitigasi perubahan iklim, dan kesejahteraan petani kecil. MoU ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam menjawab kritik Uni Eropa terhadap kelapa sawit, dengan menekankan keberlanjutan dan nilai ekonomi bagi petani lokal, serta memenuhi tuntutan pasar Eropa yang mengutamakan keberlanjutan.

Penandatanganan MoU antara Indonesia dan Belanda juga membentuk Komisi Ekonomi Bilateral sebagai wadah dialog untuk keberlanjutan kerja sama. Dialog ini sejalan dengan inisiatif Nasional untuk Pekebun Kecil Kelapa Sawit yang Berkelanjutan dan Cerdas Iklim (NI-SCOPS), yang bagian dari kegiatan COP26. Program NI-SCOPS memiliki tiga fokus utama yaitu meningkatkan kesejahteraan petani kecil melalui diversifikasi usaha dan akses pasar, meningkatkan kapasitas petani dalam menghadapi perubahan iklim, dan memperkuat upaya mitigasi perubahan iklim melalui reforestasi dan agroforestry (Astra Agro, 2021)

Indonesia menghadapi hambatan perdagangan terkait kebijakan Uni Eropa terhadap minyak kelapa sawit, salah satunya melalui penerapan resolusi mengenai kelapa sawit dan deforestasi. Untuk mengatasi ini, Indonesia mengadopsi diplomasi multitrack, termasuk Track 1 yang melibatkan diplomasi pemerintah dengan negosiasi resmi antara Indonesia dan Uni Eropa. Salah satunya adalah pertemuan dengan Parlemen Eropa pada 2017, Indonesia melalui DPR RI menyampaikan rasa kecewa atas sikap Parlemen Eropa yang secara tiba-tiba mengeluarkan resolusi terkait kelapa sawit dan deforestasi. Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP), Nurhayati Ali Assegaf, yang mewakili DPR RI, menyatakan bahwa Indonesia merasa tidak dihargai karena Parlemen Eropa tidak melakukan komunikasi terlebih dahulu sebelum mengangkat isu tersebut menjadi resolusi (DPR RI, 2017) Diskusi juga difokuskan pada isu keberlanjutan dan dampak resolusi terhadap ekspor kelapa sawit Indonesia.

Selain itu, Indonesia bekerja sama dengan Malaysia di bawah Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) untuk menanggapi resolusi

tersebut, dengan menilai bahwa kebijakan Uni Eropa bertujuan melindungi produksi minyak nabati domestik Eropa. Pertemuan ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Darmin Nasution, bersama Menteri Industri Perkebunan dan Komoditas Malaysia, Datuk Seri Mah Siew Keong (Firman, 2017) Pertemuan ini membahas perkembangan perdagangan kelapa sawit global, pentingnya kerja sama antar negara produsen untuk meningkatkan kualitas produk, serta menyebarkan informasi yang akurat tentang kelapa sawit Indonesia dan Malaysia juga mengeluarkan Joint Communique terkait kebijakan sertifikasi tunggal yang tidak mengakui sistem sertifikasi Indonesia (ISPO) dan Malaysia (MSPO).

Sebagai langkah lanjutan, Indonesia mengajukan gugatan kepada World Trade Organization (WTO) pada Desember 2019 untuk menentang kebijakan diskriminatif Uni Eropa. Di Track 3, masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah, seperti Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), turut berperan dalam melobi Uni Eropa dan memperkuat citra positif kelapa sawit Indonesia di pasar internasional, menciptakan kesepakatan dalam perjanjian *Working Group on Trade and Investment Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA)*. Kesepakatan ini termasuk dalam "Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan 2019-2024" yang bertujuan untuk memastikan keberlanjutan dan penerimaan CPO Indonesia di pasar Eropa (GAPKI, 2020)

Upaya diplomasi Indonesia ini menunjukkan komitmen dalam meningkatkan keberlanjutan industri kelapa sawit dan merespons hambatan perdagangan dengan pendekatan konstruktif serta membangun hubungan yang lebih baik dengan Uni Eropa. Kerja sama dengan Belanda tidak hanya berfungsi sebagai alat diplomasi ekonomi, tetapi juga sebagai bukti bahwa Indonesia serius dalam memperbaiki praktik produksi minyak kelapa sawitnya, yang pada akhirnya diharapkan dapat mengurangi hambatan perdagangan di pasar Eropa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, Indonesia telah melaksanakan berbagai

upaya strategis untuk mengatasi hambatan perdagangan dan embargo CPO yang diterapkan oleh Uni Eropa, khususnya Belanda. Salah satu langkah utama adalah penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Belanda pada 26 September 2019. MoU ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas petani kecil dalam praktik pertanian berkelanjutan, membantu mereka memperoleh sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), serta mendukung peningkatan produktivitas kelapa sawit yang berkelanjutan. Kemitraan ini juga berfokus pada mitigasi perubahan iklim dan peningkatan kesejahteraan petani kecil di Indonesia melalui berbagi pengetahuan dan teknologi dalam produksi kelapa sawit berkelanjutan.

Selain itu, Indonesia berupaya meningkatkan standar kualitas CPO untuk memenuhi persyaratan pasar internasional yang ketat, meskipun tantangan seperti kenaikan biaya produksi. Penerapan ISPO bertujuan untuk memastikan bahwa produksi CPO Indonesia lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan, dengan investasi dalam teknologi dan pemantauan oleh pihak ketiga. Meskipun ada keraguan dari Uni Eropa terkait standar ISPO, Indonesia tetap konsisten dalam meningkatkan kualitas dan keberlanjutan produksi. Langkah ini juga sesuai dengan kebijakan European Green Deal yang menuntut standar keberlanjutan lebih tinggi untuk biofuel.

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 mengenai Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB) turut menjadi bagian dari strategi Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kapasitas, legalisasi lahan perkebunan, serta pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi baru terbarukan. Upaya ini sejalan dengan tujuan ISPO untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar global dan memenuhi tuntutan internasional terkait pembangunan perkebunan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Astra Agro. (2021). Astra dan Belanda kembali teken kerja sama terkait kelapa sawit. Astra Agro. astra-agro.co.id.
- Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. (2019). Inpres No. 6 Tahun 2019 tentang rencana aksi nasional perkebunan kelapa sawit

- berkelanjutan tahun 2019-2024. <https://www.bpdp.or.id/inpres-no-6-tahun-2019-tentang-rencana-aksi-nasional-perkebunan-kelapa-sawit-berkelanjutan-tahun-2019-2024>
- Badan Pusat Statistik. (2020). Laporan data statistik 2020. bps.go.id.
- Creswell, J. W. (2016). Research design: Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran. Pustaka Pelajar.
- Erman, E. (2017). Di balik keberlanjutan sawit: Aktor, aliansi dalam ekonomi politik sertifikasi Uni Eropa. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 43(1).
- European Parliament. (2018). Renewable energy directive. euagenda.eu/upload/publications/eprs-bri2021662619-en.pdf.
- Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). (2020). Langkah baru pemerintah hindari diskriminasi sawit Uni Eropa. GAPKI. <https://gapki.id/news/2020/12/22/langkah-baru-pemerintah-hindari-diskriminasi-sawit-uni-eropa/>
- McDonald, J. (2012). The Institute for Multi-Track Diplomacy. *Journal of Conflictology*, 3(2).
- Nye, J. S., & Keohane, R. O. (2013). Power and interdependence. Longman.
- Rahayu, (2023). Kerjasama Indonesia-Belanda tahun 2019-2021 studi kasus: Implementasi memorandum of understanding (MoU) joint production on sustainable palm oil. *Jurnal Online Mahasiswa*, 10(2).
- Riady, & Badarul. (2023). Analisis upaya Indonesia dalam melawan black campaign minyak kelapa sawit dari Uni Eropa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 28(1).
- Sally, N. U. (2016). Sengketa minyak sawit antara Indonesia dan Uni Eropa. *Dauliyah Journal of Islamic and International Affairs*, 1(01). <https://doi.org/10.21111/dauliyah.v1i01.341>
- Suhandak, A. D. (2019). Pengaruh black campaign kelapa sawit terhadap harga kelapa sawit dunia dan ekspor kelapa sawit Indonesia. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 72(2).
- Tarigan, D. H., Azhar, A. N., & Azhar, L. N. (2023). Kerja sama perdagangan Indonesia dan Uni Eropa pasca gugatan di World Trade Organization (WTO) tahun 2019. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 6(11).
- Virgy, M. A., Djuyandi, Y., & Darmawan, W. B. (2020). Strategi jaringan

advokasi transnasional Greenpeace Indonesia terkait isu deforestasi hutan Indonesia oleh Wilmar International. *Journal of Political Issues*, 1(2).